



PENGUATAN SISTEM PERTAHANAN RAKYAT SEMESTA DI RANAH MARITIM

Strengthening of The Universe People's Defense System In The Marine Area

Dedy Rorna Widyandono, Agus Adriyanto, Ikhwan Syahtaria

Prodi Strategi Kampanye Militer, Fakultas Strategi Pertahanan, Unhan RI
(dedyromawidyandono@idu.co.id)

Abstract – *The vast territorial waters owned by the Indonesian state have the potential for broad defense and security threats as well. Maritime defense cannot be carried out by military forces of the maritime dimension alone but must be carried out in an integrated manner with other military dimensions of force, and involve all elements of non-military defense forces in a universal defense system in the maritime domain. In addition, the disproportionate number of law enforcement personnel compared to the area of responsibility has prompted the need to develop a universal people's defense policy at sea. This study aims to analyze the strengthening of the overall people's defense system at sea to improve Indonesia's maritime defense, especially in the maritime services industry for merchant fleets. The research was conducted using qualitative methods and collecting data through interviews and documentation studies. The results of the research are that the planning aspect has not been supported by laws and regulations for the defense of the universal people at sea; the organizing aspect is still not comprehensive, which does not include the maritime service industry and commercial ships; the readiness aspect has not yet been carried out on the modification and transformation of commercial ships to support the military tasks of the Indonesian Navy; as well as aspects of new development at the engineering stage of the commercial ship fleet and driving the components of the maritime service industry for the benefit of defense at sea. Problems related to the commercial ship fleet were also found, namely the absence of a modified concept of the infrastructure of the commercial ship fleet to support the universal people's defense system at sea. The research concludes that the existing universal people's defense system at sea is still not optimal and is still far from being implemented in the field. So that it is necessary to implement the strategy formulation that has been made to achieve the optimal strengthening of the universal people's defense system at sea.*

Keywords: *Defense System of the Universal People at Sea; Sea Defense; Commercial Ship Fleet;*

Abstrak – *Luasnya wilayah perairan yang dimiliki oleh negara Indonesia memiliki potensi ancaman pertahanan dan keamanan yang luas pula. Pertahanan maritim tidak dapat*



dijalankan oleh kekuatan militer matra laut semata, namun harus diselenggarakan secara terintegrasi bersama kekuatan militer matra lainnya, serta melibatkan segenap unsur kekuatan pertahanan non militer dalam suatu sistem pertahanan semesta pada ranah maritim. Selain itu, tidak sebandingnya jumlah personel penegak hukum dibandingkan dengan luas wilayah tanggung jawabnya mendorong perlunya pembangunan kebijakan pertahanan rakyat semesta di laut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan sistem pertahanan rakyat semesta di laut guna meningkatkan pertahanan laut Indonesia khususnya pada industri jasa maritime armada kapal niaga. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, dan pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian adalah aspek perencanaan belum didukung dengan peraturan perundangan untuk pertahanan rakyat semesta di laut; aspek pengorganisasian masih belum menyeluruh dimana belum meliputi industri jasa maritim dan kapal niaga; aspek kesiapan belum dilaksanakan modifikasi dan transformasi kapal niaga untuk mendukung tugas kemiliteran TNI AL; serta aspek pembinaan baru pada tahap rekayasa armada kapal niaga dan menggerakkan komponen industri jasa maritim tersebut untuk kepentingan pertahanan di laut. Ditemukan pula permasalahan terkait dengan armada kapal niaga adalah Belum adanya konsep modifikasi terhadap sarana prasarana armada kapal niaga untuk mendukung sistem pertahanan rakyat semesta di laut. Kesimpulan penelitian bahwa sistem pertahanan rakyat semesta di laut yang ada saat ini masih belum optimal dan masih jauh dalam implementasi di lapangan. Sehingga perlu diimplementasikan rumusan strategi yang telah dibuat guna mencapai penguatan sistem pertahanan rakyat semesta di laut yang optimal.

Kata Kunci: Sistem Pertahanan Rakyat Semesta, Ranah Maritim; Pertahanan Laut; Armada Kapal Niaga;

1. Pendahuluan

Dengan Luas wilayah perairan yang dimiliki Indonesia yaitu mencapai 5,8 juta km² atau sama dengan 2/3 dari luas wilayah Indonesia, terdiri dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 2,7 juta km² dan wilayah laut teritorial 3,1 juta km² hal ini membutuhkan keterlibatan komponen industri jasa maritim dalam meningkatkan pertahanan rakyat semesta di laut. Menurut data yang diungkap oleh Bakamla, sedikitnya ada delapan bentuk ancaman faktual dan berpotensi terjadi di perairan Indonesia, ancaman tersebut berupa pelanggaran wilayah, perompakan bersenjata, kecelakaan, kejahatan terorganisasi lintas negara (transnational organized crime), penangkapan ikan secara ilegal, pencemaran,



terorisme, dan invasi. Ancaman paling berbahaya yaitu masalah transnational organized crime seperti penyelundupan, perbudakan, narkoba, komoditas minerba (www.voaindonesia.com, 2022).

Persoalan realita di lapangan saat ini bahwa belum adanya regulasi peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pelaksanaan sistem pertahanan rakyat semesta di laut, belum adanya konsep modifikasi (transformasi) sarana dan prasarana armada kapal niaga, belum optimalnya pembinaan sumber daya manusia pengawak armada kapal niaga dalam mendukung sistem pertahanan rakyat semesta di laut guna meningkatkan pertahanan laut Indonesia tangguh akan berimplikasi terhadap rawannya ancaman militer dan non militer/nirmiliter di laut yang membahayakan kedaulatan NKRI.

Dawilhanla dilaksanakan untuk membangun dan meningkatkan kekuatan matra laut dalam rangka membantu pemerintah untuk menyiapkan kekuatan nasional menjadi kekuatan yang lebih spesifik yaitu wilayah pertahanan laut, dengan kekuatan pendukungnya, baik untuk Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Berdasarkan Bujuklak Dawilhanla menjelaskan bahwa penyiapan potensi nasional di bidang maritim guna Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut merupakan tanggung jawab TNI Angkatan Laut dalam rangka mengimplementasikan rencana strategis TNI AL bidang Pembinaan Potensi Maritim. Penyelenggaraan Dawilhanla pada hakekatnya merupakan kegiatan membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional dalam hal ini Potensi Maritim Nasional menjadi Kekuatan Pertahanan (Kuathan) yang dipersiapkan secara dini meliputi Wilayah Pertahanan Laut beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP) yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara sesuai dengan Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta).

Dawilhanla adalah segala usaha kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengerahan dan pengendalian serta pemanfaatan semua potensi maritim untuk menjadi kemampuan dan kekuatan kewilayahan yang tangguh guna mendukung kepentingan pertahanan negara di laut. Dinas Potensi Maritim



(Dispotmar) TNI AL merupakan implementasi dari tugas TNI Angkatan Laut dalam memberdayakan potensi kelautan. Dispotmar mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan fungsi dan pelaksanaan kegiatan pembinaan potensi nasional maritim yang meliputi pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), sumber daya alam dan buatan serta sarana dan prasarana nasional di bidang maritim serta dinamisasi pembangunan kelautan, maka unsur penentu dalam Binpotmar adalah SDM.

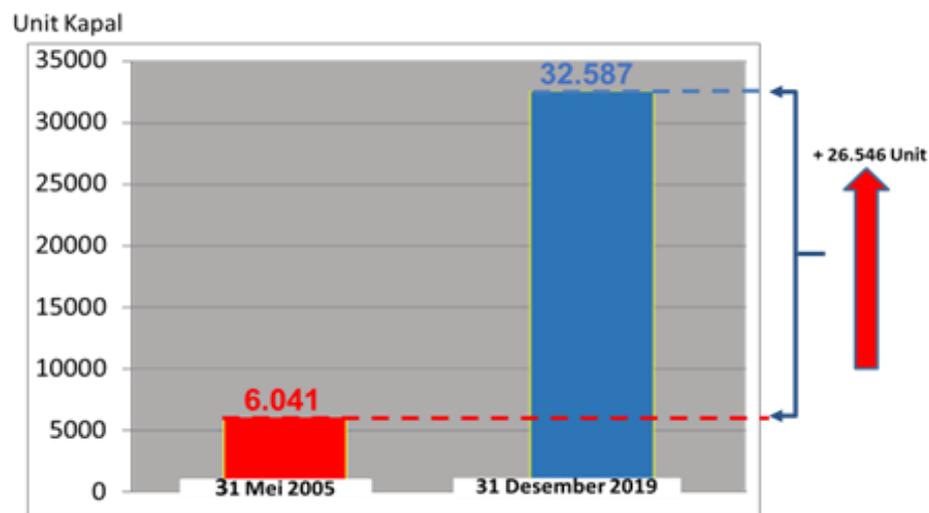
Keberhasilan TNI AL yang bertugas melaksanakan Dawilhanla ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola Potensi Maritim Nasional menjadi kekuatan komponen pendukung dan komponen cadangan pertahanan negara yang dapat digunakan untuk Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Untuk itu pola pembinaan Dawilhanla disesuaikan dengan tingkat kematangan/kesiapan dari potensi maritim nasional yang dimiliki. Berdasarkan Bujuklak Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut, sebagai Subjek dari penyelenggaraan Dawilhanla adalah seluruh Komando wilayah (Kowil) yang ada di jajaran TNI AL yaitu; Koarmada, Lantamal, Lanal, Lanudal, Posal, sedangkan objek Dawilhanla adalah seluruh Potensi Nasional bidang Maritim/Kelautan yang meliputi; Ruang, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), Sarana Prasarana, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Nilai-nilai Luhur, Pendanaan/Pembiayaan

Pada program pelaksanaan pembinaan SDN matra laut sebagai kekuatan cadangan dan pendukung pertahanan laut, dalam hal ini TNI AL selaku komponen utama penyelenggaraan pertahanan laut telah melaksanakan program pemberdayaan wilayah pertahanan laut (Dawilhanla) atau menggunakan istilah Pembinaan Potensi Nasional Menjadi Kekuatan Maritim (Binpotnaskuatmar). Dispotmar melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan negara di laut. Kegiatan tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk, antara lain:

1. Pemberdayaan potensi nasional menjadi kekuatan maritim.
2. Pembinaan teritorial matra laut.
3. Pembinaan kepramukaan khususnya Pramuka Saka Bahari.

4. Melaksanakan Operasi Bakti TNI AL Surya Bhaskara Jaya yang mengedepankan operasi bhakti kesehatan, penyuluhan, kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilaksanakan secara mandiri maupun bersama-sama instansi terkait lainnya.
5. Pemberdayaan industri jasa maritim, dll.

Secara keseluruhan kegiatan tersebut diatas ditujukan untuk menyiapkan komponen cadangan dan komponen pendukung guna pelaksanaan tugas dan fungsi komponen utama pertahanan TNI. Namun kondisi saat ini pemberdayaan potensi nasional khususnya pemberdayaan terhadap industri jasa maritim belum sampai pada tahap TNI AL dapat melaksanakan rekayasa armada kapal niaga dan menggerakkan komponen industri jasa maritim tersebut untuk kepentingan pertahanan di laut. Hal tersebut disebabkan beberapa hal salah satunya belum adanya payung hukum yang kuat.



Gambar 1. Perkembangan Armada Kapal Niaga Nasional Data Des 2019

Sumber: Data Dirjenhubla Kementerian Perhubungan RI (2019)

Dari Gambar 1. diatas diketahui bahwa posisi per 31 Desember 2019 jumlah total armada kapal niaga sebanyak 32.587 kapal (45 juta GT), bila dibandingkan dengan jumlah armada kapal niaga pada bulan Mei 2005 yang total armadanya sebanyak 6.041 unit kapal



(5,67 juta GT) maka terjadi peningkatan jumlah armada sebanyak 26.546 kapal. Jumlah armada kapal niaga ini merupakan jumlah yang relatif cukup besar dari sumberdaya nasional bidang maritim untuk diberdayakan menjadi komponen cadangan pertahanan rakyat semesta di laut.

Pembinaan sumber daya manusia pengawak armada kapal niaga sangat penting berperan dalam mewujudkan sishanrata di laut. Pembinaan tersebut dapat diawali melalui koordinasi antara TNI AL dan armada kapal niaga dalam rangka mewujudkan sishanrata di laut. Terjalannya sistem pembinaan dan koordinasi antara TNI Angkatan laut dan kapal niaga (*Naval and Merchant Fleet Coordination*) merupakan salah satu modal *sea power* pertahanan di laut guna mewujudkan sistem pertahanan rakyat semesta di laut.

2. Metode Penelitian

Metode dan pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif-analitis, yaitu: suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan data dan fakta yang ada, kemudian dianalisis dan dirumuskan dalam upaya pemecahan permasalahan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data interactive model menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014).

3. Hasil dan Pembahasan

Kondisi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Di Laut Yang Ada Saat Ini

Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Pada pasal 3 UU No. 23 tahun 2019 tentang pengelolaan SDN menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara bertujuan untuk mentransformasikan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional menjadi kekuatan pertahanan negara yang siap digunakan untuk kepentingan pertahanan negara, oleh karena itu maka penting kiranya bagi TNI khususnya TNI AL untuk dapat mentransformasi sumber daya nasional bidang maritim untuk mendukung terlaksananya sistem pertahanan rakyat semesta di laut



guna meningkatkan pertahanan laut Indonesia yang tangguh dalam rangka menegakkan kedaulatan NKRI.

Doktrin TNI AL “Eka Sasana Jaya”. Dalam Doktrin TNI AL “Eka Sasana Jaya” ditegaskan bahwa TNI AL merumuskan produk strategis yang disebut Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) yang diharapkan menjadi landasan bergerak TNI AL dalam pertahanan laut Indonesia baik dalam kondisi damai maupun kritis atau perang. Sejalan dengan berkembangnya strategi peperangan laut yang diaplikasikan untuk menghadirkan kemenangan maka konsep sea control dan sea denial masih menjadi strategi utama dalam pertempuran laut dan konsepsi *Maritime Domain Awareness* (MDA) serta integrasi operasi tempur laut, darat, dan udara berbasis teknologi. Selain sebagai instrumen pertahanan dan militer, kekuatan laut digunakan oleh negara sebagai instrumen penegakan hukum dan diplomasi (*naval diplomacy*). Untuk mengaplikasikan doktrin ini perlu didukung oleh seluruh sumber daya nasional bidang maritim sebagai kekuatan pendukung TNI AL dihadapkan dengan keterbatasan alutsista yang dimiliki dihadapkan luasnya wilayah perairan Indonesia.

Doktrin TNI AL tentang Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut. Pada pasal 15 Doktrin TNI AL tentang pemberdayaan wilayah pertahanan laut menyebutkan bahwa komponen maritim adalah suatu bentuk kekuatan nasional, yang merupakan integrasi atau gabungan dari komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung digunakan sebagai sarana untuk menegakkan kedaulatan dan keamanan di laut, dalam rangka melindungi dan menjamin kepentingan nasional di dan atau lewat laut . Hal ini menjadi landasan operasional bagi tersusunnya konsepsi sistem pertahanan rakyat semesta di laut guna meningkatkan pertahanan laut Indonesia tangguh dalam rangka menegakkan kedaulatan NKRI.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, dapat diketahui unsur-unsur, yang menghambat proses terlaksananya sistem pertahanan rakyat semesta di laut. Terkait hal ini dibutuhkan analisis terhadap penggunaan fungsi manajemen yaitu fungsi planning,



organizing, actuating dan controlling sebagaimana teori manajemen yang dikemukakan George R.Terry.

a. Perencanaan Pembuatan Konsep Sistem Pertahanan Rakyat Semesta di laut (Planning). Berdasarkan data primer kondisi kebijakan pemerintah saat ini yang berhubungan dengan sistem pertahanan rakyat semesta di Laut belum dapat memayungi TNI AL melaksanakan manajemen Sishanrata di laut menurut teori manajemen yang dikemukakan oleh George R.Terry, yang menyatakan bahwa fungsi manajemen mengemban 4 (empat) fungsi yaitu fungsi *planning, organizing, actuating dan controlling*.

1) Kebijakan yang berkaitan dengan Sishanrata saat ini:

(a) Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen);

(b) Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Pada undang-undang ini terdapat beberapa kebijakan yang berkaitan dengan sistem pertahanan rakyat semesta;

(c) Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang TNI;

(d) Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara;

(e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengamanatkan mengenai usaha bela negara, komponen cadangan, dan komponen pendukung diatur dengan Undang-Undang;

(f) Doktrin TNI AL tentang Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut. Kondisi saat ini dalam melaksanakan amanat Undang-Undang pada pemberdayaan wilayah pertahanan laut, TNI AL telah menerbitkan doktrin Dawilhanla berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep /2639/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Doktrin Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut.

b. Pengorganisasian Sumber Daya Nasional Industri Jasa Maritim menjadi Komponen Cadangan Matra Laut (*Organizing*). Secara umum pengorganisasian, pembentukan dan pembinaan komponen cadangan dan komponen pendukung bidang SDM telah berjalan



dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa penyempurnaan pada penyelenggaraan program pembinaan tersebut.

Untuk penyelenggaraan pembinaan SDM matra darat sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung relatif telah berjalan, namun untuk matra laut hal ini menjadi sebuah hal baru. TNI AL bersama Kementerian Pertahanan selaku *leading sector* pada kegiatan program bela negara yang bertujuan untuk merekrut warga negara yang terpilih untuk dilatih sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 melaksanakan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, yang digelar di Gedung Panti Tjahaya Armada (PTA) Koarmada II, Surabaya.

Program dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan sangat baik untuk membentuk komponen cadangan matra laut, namun kondisi pengorganisasian saat ini penyelenggaraanya belum menyentuh sektor pembinaan sumber daya buatan sarana dan prasarana matra laut atau lebih dikenal dengan industri jasa maritim (Injasmar).

c. Kesiapan Pelibatan Armada Kapal Niaga menjadi Komponen Cadangan Kekuatan Matra Laut (*Actuating*). Secara aktual pelibatan sumber daya nasional industri jasa maritim untuk dapat menjadi komponen cadangan Matra Laut dalam melaksanakan tugas pokoknya baik OMP maupun OMSP membutuhkan tahap persiapan dan perencanaan jauh hari sebelumnya. Keterlibatan industri jasa maritim dalam hal ini armada kapal niaga untuk dapat digunakan sebagai komponen cadangan matra laut membutuhkan beberapa persiapan perencanaan (*planning*) dan konsep pelaksanaan di lapangan (*actuating*). Industri jasa maritim dan Angkatan Laut merupakan sama-sama bidang pekerjaan yang berbasis teknologi, sehingga bila kedua kekuatan ini agar bisa bekerja sama maka dibutuhkan rekayasa teknologi baik hardware (fisik kapal/peralatan) dan software (sistem komunikasi dan jaringan), hal ini membutuhkan waktu dan organisasi yang mampu mewadahnya.

Kondisi saat ini pelibatan unsur masyarakat industri jasa maritim dalam memberikan supporting bagi kapal perang TNI AL (KRI) baik mendukung pada kegiatan OMP dan OMSP belum sampai pada tahap secara aktual melaksanakan modifikasi atau transformasi



terhadap industri jasa maritim armada kapal niaga agar secara kompatibel dapat mendukung tugas-tugas kemiliteran kapal perang TNI AL.

d. Pembinaan Sumber Daya Nasional Matra Laut (*controlling*). Pada program pelaksanaan pembinaan SDN matra laut sebagai kekuatan cadangan dan pendukung pertahanan laut, dalam hal ini TNI AL selaku komponen utama penyelenggaraan pertahanan laut telah melaksanakan program pemberdayaan wilayah pertahanan laut (Dawilhanla) atau menggunakan istilah Pembinaan Potensi Nasional Menjadi Kekuatan Maritim (Binpotnaskuatmar). Menyadari akan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki TNI AL, serta kompleksitas permasalahan pembinaan potensi maritim yang harus dilaksanakan secara lintas sektoral, maka TNI AL perlu membina kemitraan, dengan merangkul serta mendorong Kementerian atau Instansi terkait, untuk ikut berperan serta secara aktif dalam melaksanakan pembinaan potensi maritim melalui berbagai upaya memanfaatkan potensi maritim.

Kegiatan Dawilhanla tersebut telah diamanatkan pada pasal 9 huruf (e) undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Upaya pemanfaatan potensi maritim tersebut antara lain untuk menumbuhkan kepekaan terhadap segala aspek kemaritiman serta lingkungan hidup wilayah laut, pantai dan pesisir, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam laut guna menciptakan kondisi yang kondusif bagi investasi dan usaha sektor kelautan. Amanah tersebut diemban oleh Dinas Potensi Maritim TNI AL (Dispotmar) melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan negara di laut. Kegiatan tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk, antara lain:

- 1) Pemberdayaan potensi nasional menjadi kekuatan maritim.
- 2) Pembinaan teritorial matra laut.
- 3) Pembinaan kepramukaan khususnya Pramuka Saka Bahari.
- 4) Melaksanakan Operasi Bakti TNI AL Surya Bhaskara Jaya yang mengedepankan operasi bhakti kesehatan, penyuluhan, kegiatan sosial dan pemberdayaan



masyarakat pesisir yang dilaksanakan secara mandiri maupun bersama-sama instansi terkait lainnya.

- 5) Pemberdayaan industri jasa maritim, dll.

Secara keseluruhan kegiatan tersebut diatas ditujukan untuk menyiapkan komponen cadangan dan komponen pendukung guna pelaksanaan tugas dan fungsi komponen utama pertahanan TNI. Namun kondisi saat ini pemberdayaan potensi nasional khususnya pemberdayaan terhadap industri jasa maritim belum sampai pada tahap TNI AL dapat melaksanakan rekayasa armada kapal niaga dan menggerakkan komponen industri jasa maritim tersebut untuk kepentingan pertahanan di laut. Hal tersebut disebabkan beberapa hal salah satunya belum adanya payung hukum yang kuat.

Strategi Penguatan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Di Laut Guna Meningkatkan Pertahanan Laut Indonesia Yang Tangguh Dalam Rangka Menegakkan Kedaulatan NKRI.

Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta merupakan implementasi strategi total defense khas di Indonesia (Halkis, 2022) Penyelenggaraan Dawilhanla tidak dapat dijalankan oleh TNI AL semata, namun harus dilaksanakan secara terintegrasi bersama institusi lainnya, baik lembaga pemerintah maupun pihak swasta, seperti pembinaan kesadaran bela negara yang dapat melibatkan Kesbangpol.

Kondisi yang diharapkan serta kebijakan pembentukan sistem pertahanan rakyat semesta di laut, maka rumusan kebijakan konsepsi sistem pertahanan rakyat semesta di laut sebagai berikut: "Terwujudnya sistem pertahanan rakyat semesta di laut melalui penyusunan regulasi peraturan perundang-undangan, penyusunan konsep modifikasi sarana dan prasarana armada kapal niaga, serta pembinaan sumber daya manusia pengawak armada kapal niaga guna meningkatkan pertahanan laut Indonesia tangguh dalam rangka menegakkan kedaulatan NKRI."



Berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan di atas, maka disusun beberapa strategi yang diarahkan untuk menjabarkan metode yang akan digunakan, sarana yang digunakan, serta untuk mencapai setiap sasaran yang diinginkan berdasarkan skala prioritas.

a. Strategi pertama yaitu dengan mewujudkan penyusunan regulasi peraturan perundang-undangan sebagai pedoman perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan keterlibatan armada kapal niaga dalam sistem pertahanan rakyat semesta di laut, melalui Pengajuan peraturan pemerintah sistem pertahanan rakyat semesta di laut, Pengajuan Keppres atau Perpres TNI AL sebagai pembina komponen cadangan pertahanan laut Indonesia bertanggung jawab menyiapkan armada kapal niaga menjadi kekuatan cadangan pertahanan laut, Pengajuan pembentukan organisasi Armada Cadangan Pertahanan Laut sebagai tempat organisasi pelaksana penyiapan armada kapal niaga menjadi komponen cadangan pertahanan laut, dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan regulasi dan piranti lunak pembentukan sistem pertahanan rakyat semesta di laut.

Oleh karena itu upaya-upaya yang dapat dilaksanakan sebagai penjabaran strategi adalah sebagai berikut:

- 1) Pengajuan peraturan pemerintah sistem pertahanan rakyat semesta di laut sebagai tindak lanjut sistem pertahanan negara yang bersifat semesta.
- 2) Menteri Pertahanan RI, Panglima TNI, Kementerian lembaga terkait, Kasal dan perwakilan organisasi armada kapal niaga Indonesia (*Indonesia National Shipowners' Association/INSA*) mengadakan pembahasan dan evaluasi tentang kondisi keamanan maritim Indonesia serta dihadapkan dengan kebijakan sistem pertahanan negara yang menganut sistem pertahanan rakyat semesta.
- 3) Konsep modifikasi-modifikasi armada kapal niaga dalam pertahanan negara khususnya wilayah laut di Indonesia merupakan bagian dalam proses kebijakan publik dan tahap ini adalah yang paling krusial, karena implementasi dan evaluasi kebijakan sistem pertahanan negara yang bersifat semesta akan terlaksana dengan



efektif apabila tahap pembuatan kebijakan sistem pertahanan rakyat semesta di laut terwujud;

4) Pengajuan Keppres atau Perpres TNI AL sebagai pembina komponen cadangan pertahanan laut Indonesia bertanggung jawab menyiapkan armada kapal niaga menjadi kekuatan cadangan pertahanan laut dalam mendukung sistem pertahanan rakyat semesta;

5) Mengadakan pembahasan dan pengkajian usulan pembentukan organisasi Armada Cadangan Pertahanan Laut sebagai implementasi konsep sistem pertahanan rakyat semesta di laut penjabaran dari sistem pertahanan negara yang bersifat semesta. Organisasi berfungsi sebagai agen operasi manajerial tunggal untuk semua angkutan laut dalam konteks kepentingan pertahanan negara dalam hal ini pertahanan laut Indonesia, yang dilaksanakan pada masa damai (kapal niaga akan beroperasi secara normal), keadaan darurat nasional (kontijensi) dan masa krisis (perang). Komando ini titik beratnya berorientasi untuk menyiapkan kekuatan armada cadangan untuk menghadapi pada saat terjadi kontingensi dan mengembangkan kemampuan ekspansi menghadapi situasi krisis (perang), terutama dengan menggandakan kekuatan dari dukungan armada kapal niaga. Komando ini akan mengembangkan sistem baru kegiatan transportasi laut. Sektor yang dimaksud dalam sistem transportasi laut ini diantaranya adalah pelabuhan peti kemas, kapal kargo, kapal tanker, kapal roll on, kapal roll-off, pelabuhan inovatif, bidang teknik manajemen dan desain kapal yang dapat melayani kebutuhan operasi militer;

6) Mengadakan pembahasan dan pengkajian tentang pelaksanaan konsep modifikasi armada kapal niaga menjadi komponen cadangan pertahanan laut yang mampu mendukung operasi militer TNI AL pada masa damai dan masa krisis guna mewujudkan sistem pertahanan rakyat semesta di laut secara optimal, berkesinambungan dan efisien dengan mengedepankan prinsip keterpaduan antara kepentingan bisnis dari armada kapal niaga dan kepentingan nasional untuk menjaga pertahanan negara di laut;



7) Menyusun naskah validasi organisasi pembentukan organisasi Komando Armada Cadangan Pertahanan Laut sebagai implementasi konsep sistem pertahanan rakyat semesta di laut. Organisasi ini secara umum menyiapkan sumberdaya nasional menjadi komponen cadangan pertahanan laut dan secara teknis memberikan pendampingan dan saran pada proses pembuatan rancang bangun kapal-kapal komersial sehingga kapal tersebut selain berfungsi komersial (pada masa damai) namun bila dibutuhkan oleh negara dapat sebagai kapal pendukung operasi militer untuk pertahanan laut Indonesia.

b. **Strategi kedua** yaitu dengan mewujudkan kesiapan sarana prasarana armada kapal niaga dalam mendukung sistem pertahanan rakyat semesta di laut, melalui pengajuan konsep modifikasi armada kapal niaga agar dapat menjadi komponen cadangan pertahanan laut yang mampu mendukung operasi militer pada masa damai dan masa krisis, Pembuatan Perjanjian Kerja Sama (PKS), Pengajuan pembentukan organisasi tingkat teknis di bawah TNI AL sebagai tempat untuk analisa dan pembahasan mengenai perencanaan modifikasi armada kapal niaga, dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan regulasi dan piranti lunak penyiapan sarana prasarana armada kapal niaga menjadi komponen cadangan dalam sistem pertahanan rakyat semesta di laut.

Oleh karena itu upaya-upaya yang dapat dilaksanakan sebagai penjabaran strategi adalah sebagai berikut:

1) Pengajuan konsep modifikasi armada kapal niaga agar dapat menjadi komponen cadangan pertahanan laut;

Armada kapal niaga dan TNI AL terlebih dahulu harus memiliki pemahaman yang sama dan jelas tentang sistem pertahanan negara yang bersifat semesta serta kontribusi mereka terhadap kebijakan negara bidang pertahanan tersebut. Dengan penyamaan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan sistem pertahanan rakyat semesta, hal ini menjadi langkah awal pihak swasta dalam hal ini armada kapal niaga



untuk dapat berkontribusi secara efektif dan nyata dalam mendukung kepentingan pertahanan negara demi tujuan bersama mewujudkan kepentingan nasional.

Modifikasi armada kapal niaga menjadi komponen cadangan pertahanan laut dapat mengefektifkan sistem anggaran pengadaan kapal perang di TNI Angkatan Laut, sehingga manajemen pengadaan kapal di TNI AL dapat difokuskan pada pengadaan kapal tempur (combatan) dengan meminimalkan pembelian kapal non-kombatan, karena kebutuhan untuk kapal bantu seperti kapal dukungan angkutan logistik, angkutan personel dan lainnya termasuk pemeliharaan darurat dapat menggunakan armada kapal niaga sebagai solusinya.

Konsep modifikasi armada kapal niaga menjadi komponen cadangan pertahanan laut akan memberi manfaat pada terjalannya kerja sama antara TNI AL dan armada kapal niaga menjadi sebuah operasi tim yang lebih efisien, produktif dan tanggap pada operasi rutin masa damai dan masa krisis.

2) Merancang sistem pelatihan yang berkelanjutan untuk mendukung terlaksananya operasi kapal-kapal TNI AL dan armada kapal niaga yang terintegrasi sehingga dapat meningkatkan efektivitas operasional bersama antara TNI AL dan armada kapal niaga dalam keadaan darurat atau masa krisis.

Penggunaan kapal komersial dalam mendukung pertahanan di laut diantaranya dapat difungsikan sebagai dukungan logistik untuk Angkatan Laut, untuk membawa kargo berukuran besar dan mengirimkan material ke daerah terpencil yang tidak ada layanan kapal komersial di daerah tersebut.

3) Merancang beberapa kapal niaga secara khusus agar selaras (compatibel) bila akan digunakan untuk mendukung aksi reaksi cepat jika terjadi suatu kontinjensi di laut.

4) Pembuatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) modifikasi sarana prasarana armada kapal niaga menjadi kapal komponen cadangan antara TNI AL selaku pembina SDN dengan Kementerian/Lembaga terkait dan perwakilan asosiasi pemilik kapal Indonesia (Indonesian National Shipowners' Association/INSA) guna mewujudkan



sistem pertahanan rakyat semesta di laut dalam mendukung sistem pertahanan negara yang bersifat semesta.

5) Pembentukan organisasi tingkat teknis di bawah Komando Armada Cadangan Pertahanan Laut sebagai tempat untuk analisa dan pembahasan yang bersifat teknis. Organisasi ini mengatur pada tahap awal sebuah kapal niaga produksi dalam negeri dibuat yaitu mulai tahap pembuatan konstruksi kapal sehingga konstruksi kapal niaga tersebut telah mengakomodir kebutuhan teknis untuk mendukung operasi militer TNI AL pada masa damai dan masa krisis diantaranya hal-hal yang berkaitan;

(a) Konstruksi Kapal

(1) Memasang peralatan komunikasi yang kompatibel untuk operasi dengan Angkatan Laut.

(2) Peralatan dan perlengkapan untuk transfer bahan bakar dan kargo (crane/boom).

(3) Landasan pendaratan helikopter (helly pad) untuk modifikasi semua jenis kapal: kapal tanker, angkutan, kapal peti kemas dan multiguna.

(4) Fasilitas komando dan kendali pada kapal-kapal tertentu.

(b) Operasional kapal. Penyusunan standar operasional dan prosedur bersama bagi seluruh unsur-unsur kapal komponen cadangan pertahanan laut yang mampu mendukung operasi militer TNI AL pada masa damai dan masa krisis guna mewujudkan sistem pertahanan rakyat semesta di laut.

(c) Sistem komunikasi kapal. Penyamaan persepsi dan kesepakatan spesifikasi peralatan komunikasi kapal yang akan digunakan sebagai sarana komunikasi antara armada kapal niaga dengan armada kapal perang TNI AL sehingga terjalin sistem komunikasi sesuai yang diharapkan.

(d) Sistem persenjataan untuk perlindungan diri (pada saat krisis).

c. Strategi ketiga yaitu dengan mewujudkan pembinaan sumber daya manusia pengawak armada kapal niaga dalam mendukung terwujudnya sistem pertahanan rakyat



semesta di laut, melalui pembentukan pusat pelatihan komponen cadangan pertahanan laut, pembuatan perjanjian kerja sama antara pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan dengan Indonesian National Shipowners' Association (INSA), dengan metode koordinasi, kerjasama, sosialisasi, penyusunan dan pengusulan menggunakan sarana legislasi berupa Undang-Undang, Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut, Surat Perintah dan kelompok kerja dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan pembinaan sumber daya manusia pengawak armada kapal niaga yang mampu mendukung sistem pertahanan rakyat semesta di laut.

Adanya partisipasi masyarakat diharapkan agar tujuan pemberdayaan tercapai, maka program perencanaan, pelaksanaan kegiatan, bahkan monitoring dan evaluasi serta pemeliharaan hasilnya benar-benar melibatkan masyarakat karena merekalah yang paling tahu akan permasalahan dan kebutuhan untuk memberdayakan wilayahnya (Kalesaran, Rantung, & Pioh, 2015). Berdasarkan uraian tersebut, masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan laut maupun pertahanan negara, maka jelas bahwa masyarakat juga pasti dilibatkan dalam pertahanan laut. Pelibatan masyarakat dalam pertahanan laut di antaranya melalui Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut (Dawilhanla).

Berdasarkan Perkasal/39/VII/2011, hakikat pemberdayaan wilayah pertahanan laut adalah upaya menyiapkan wilayah pertahanan laut dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai Sistem Pertahanan Semesta melalui upaya membangun, memelihara meningkatkan dan memantapkan pembinaan potensi maritim. Dawilhanla dilaksanakan untuk membangun dan meningkatkan kekuatan matra laut dalam rangka membantu pemerintah untuk menyiapkan kekuatan nasional menjadi kekuatan yang lebih spesifik yaitu wilayah pertahanan laut, dengan kekuatan pendukungnya, baik untuk Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Oleh karena itu upaya-upaya yang dapat dilaksanakan sebagai penjabaran strategi adalah sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Pusat Pelatihan Komponen Cadangan Pertahanan Laut. Pusat pelatihan ini sebagai wadah penyiapan sumber daya manusia pengawak armada kapal



niaga untuk dapat mengoperasikan kapal niaga dengan memberikan bantuan dukungan operasi militer dalam mewujudkan sistem pertahanan rakyat semesta di laut;

- 2) Pembuatan perjanjian kerja sama pelatihan bela negara yang wajib diikuti oleh seluruh anak buah kapal (ABK) yang diusulkan menjadi kapal komponen cadangan;
- 3) Mengikut sertakan komponen cadangan pertahanan laut dalam latihan yang di gelar oleh TNI AL.

4. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan mengenai konsepsi sistem pertahanan rakyat semesta di ranah maritime dalam rangka meningkatkan pertahanan laut Indonesia tangguh guna menegakkan kedaulatan NKRI, dapat ditarik kesimpulan:

- a. Kondisi sistem pertahanan rakyat semesta di ranah maritim yang ada saat ini
 - 1) Perencanaan Pembuatan Konsep Sistem Pertahanan Rakyat Semesta di laut (*Planning*). Kebijakan yang berkaitan dengan Sishanrata saat ini didasari dari Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara; Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang TNI; Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara; Doktrin TNI AL tentang Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut.
 - 2) Pengorganisasian Sumber Daya Nasional Industri Jasa Maritim menjadi Komponen Cadangan Matra Laut (*Organizing*). Kondisi pengorganisasian saat ini penyelenggaraanya belum menyentuh sektor pembinaan sumber daya buatan sarana dan prasarana matra laut atau lebih dikenal dengan industri jasa maritim (Injasmar).
 - 3) Kesiapan Pelibatan Armada Kapal Niaga menjadi Komponen Cadangan Kekuatan Matra Laut (*Actuating*). Belum sampai pada tahap secara aktual melaksanakan modifikasi atau transformasi terhadap industri jasa maritim armada kapal niaga agar secara kompatibel dapat mendukung tugas-tugas kemiliteran kapal perang TNI AL.



4) Pembinaan Sumber Daya Nasional Matra Laut (*controlling*). Belum sampai pada tahap TNI AL dapat melaksanakan rekayasa armada kapal niaga dan menggerakkan komponen industri jasa maritim tersebut untuk kepentingan pertahanan di laut.

Ditemukan permasalahan dalam sistem pertahanan rakyat semesta di ranah maritim yaitu:

- 1) Belum adanya regulasi peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pelaksanaan sistem pertahanan rakyat semesta di laut.
- 2) Belum adanya konsep modifikasi terhadap sarana prasarana armada kapal niaga untuk mendukung sistem pertahanan rakyat semesta di laut.
- 3) Belum optimalnya pembinaan sumber daya manusia pengawak armada kapal niaga dalam mendukung sistem pertahanan rakyat semesta di laut.

b. Strategi penguatan sistem pertahanan rakyat semesta di laut dalam rangka meningkatkan pertahanan laut Indonesia yang tangguh guna menegakkan kedaulatan NKRI.

- 1) Mewujudkan penyusunan regulasi peraturan perundang-undangan sebagai pedoman perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan keterlibatan armada kapal niaga dalam sistem pertahanan rakyat semesta di laut;
- 2) Mewujudkan kesiapan sarana prasarana armada kapal niaga dalam mendukung sistem pertahanan rakyat semesta di laut;
- 3) Mewujudkan pembinaan sumber daya manusia pengawak armada kapal niaga dalam mendukung terwujudnya sistem pertahanan rakyat semesta di laut.

Daftar Pustaka

Jurnal

Sartono & Lukman Y. Prakoso. (2020). Impresi dan Otoritas Pemerintah Indonesia dalam Mengamankan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). *Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut*, 6(3), 231-256.



Buku

- Alfred Thayer Mahan. 1981. *The Influence of Sea Power. U.M.C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia since ca. 1300. London: Macmillan.*
- Fred R. David. (2009). *Manajemen Strategis : Konsep*, terjemahan, Dono Sunardi. Salemba empat, Jakarta
- George R. Terry. (1956). *Principles of Management*. Publish Richard D. Irwin from The University of California.
- Ike Yessi Widowati. (2021). *Elements of Strategic National Defense in the State Maritime Indonesia*. Jakarta
- Ken Booth. (1977). *Navies and Foreign Policies*. New York.
- Mhd Halkis, 2022, *Filsafat Ilmu Pertahanan Suatu pengantar*, Unhan Press, Bogor
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Prihantoro, Kasih & Lukman Yudho Prakoso. (2021). *Urgensi Transformasi Networking dan Driver Force Kebijakan Pertahanan*. Jakarta

Website

- Dispen Lantamal XII. (2020). Lantamal XII Laksanakan Dawilhanla Wilayah Pesisir Tahun 2020. Dalam <https://lantamal12-koarmada1.tnial.mil.id/Berita/tabid/63/articleType/ArticleView/articleId/1326/Default.aspx> diakses pada 21 November 2022
- Voaindonesia.com. (2022). "Bakamla ungkap sejumlah ancaman keamanan laut Indonesia" Dalam <https://www.voaindonesia.com/a/bakamla-ungkap-sejumlah-ancaman-keamanan-laut-indonesia>. diakses pada 21 November 2022